

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, tidak efektif apabila negara kepulauan seperti Indonesia memiliki pemerintahan yang hanya terpusat pada pemerintah pusat saja, DPRD sebagai wakil rakyat di daerah mempunyai fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPRD mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyusunan, penetapan hingga pelaksanaan APBD. Apabila pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap berjalannya APBD tidak dijalankan dengan baik, maka ada kemungkinan akan terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa anggota DPRD yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dalam hal yang berhubungan dengan pengelolaan APBD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Studi Kepustakaan (*library research*) dan wawancara kepada anggota DPRD Kota Semarang, data yang digunakan yaitu data sekunder sebagai data primer dalam menganalisa data. Penulis melakukan analisis data dengan analisis data kualitatif, setelah data yang di kumpulkan di analisis sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017 dimulai dari perumusan, penyusunan, penetapan hingga Pelaksanaan APBD sehingga pengawasan terhadap eksekusi program kerja yang dibiayai oleh APBD berjalan dengan efektif. Hambatan-hambatan yang terjadi yaitu karena sumber daya manusia yang bermacam-macam, perbedaan pikiran anggota dewan yang berasal dari fraksi yang berbeda dan kurangnya data-data pelengkap yang menunjang DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan fungsi pengawasan dengan cara meningkatkan kapasitas anggota DPRD, memanfaatkan bantuan staf ahli dengan optimal, melakukan lobi antar fraksi, kemudian memperkuat kualitas anggota partai dengan beberapa pelatihan-pelatihan agar tidak menghambat atau merugikan pelaksanaan APBD di Kota Semarang.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, DPRD, APBD

ABSTRACT

Indonesia is the largest archipelagic country in the world, it isn't effective if an archipelagic country like Indonesia has a government that is only centered on the central government, the DPRD as a people's representative in the region has a function, one of which is a supervisory function. supervision of the preparation, stipulation and implementation of the Regional Budget. If the implementation of the DPRD's oversight function on the running of the Regional Budget is not carried out properly, then there is a possibility that arbitrary actions will be taken by one or several DPRD members who have the authority to determine policies in matters relating to the Regional Budget.

The purpose of this study was to determine the implementation of the DPRD supervisory function on the management of the Semarang City Budget in 2017, the obstacles that occur in the implementation of the DPRD's oversight function on the management of the Regional Budget, as well as efforts that can be taken to overcome these obstacles.

The method of approach used in this bachelor thesis is normative juridical, namely research that is based on existing legal rules. The method of data collection is done by library research and interviews with members of the Semarang City DPRD, the data used is secondary data as primary data in analyzing data. The author analyzes the data with qualitative data analysis, after the data collected is analyzed so as to get the expected results.

Based on the results of the research conducted by the author, it can be seen that the implementation of the DPRD's oversight function in the management of the Semarang City Budget in 2017 starts from the formulation, preparation, and stipulation of the Regional Budget to the supervision of the execution of work programs funded by the Regional Budget. Obstacles that occur are due to various human resources, differences of mind of board members who come from different factions and lack of supplementary data that supports the DPRD in carrying out the supervisory function. Efforts that can be made in overcoming these obstacles are improving the oversight function by increasing the capacity of DPRD members, utilizing expert staff assistance optimally, lobbying between factions, then strengthening the quality of party members with several trainings so as not to hamper or detrimental to APBD implementation in the City Semarang.

Key word : Supervisory function, DPRD, Regional Budget (APBD)